

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Kasus korupsi yang melibatkan perdagangan timah di PT Timah Tbk pada periode 2015 hingga 2022 merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah sektor pertambangan di Indonesia, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Praktik yang digunakan sangat terstruktur, melibatkan kerjasama ilegal antara pejabat PT Timah, pengusaha swasta, pemilik smelter, dan pejabat pemerintah daerah. Harvey Moeis berperan sebagai fasilitator dan esekutor dalam mengelola praktik korupsi tersebut, yang memberikan dampak luas terhadap keuangan negara, lingkungan, tatanan sosial, dan penegakan hukum.

Dampak ekonomi dari kasus ini sangat signifikan, termasuk hilangnya pendapatan negara dari royalti, pajak, serta manipulasi harga dan jumlah produksi. Dampak ekonomi tersebut mencapai Rp28,934 triliun. Terdiri dari kerugian atas kerja sama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar Rp2,285 triliun dan kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp26,649 triliun. Kerusakan lingkungan bahkan lebih parah, dengan kerugian ekologis dan ekonomis lingkungan yang mencapai Rp271,1 triliun berdasarkan penelitian dari Guru Besar IPB, serta biaya pemulihan yang sangat tinggi akibat dari kerusakan hutan, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dari sisi sosial, kasus ini menimbulkan ketidakadilan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan, serta mengakibatkan konflik di tingkat lokal. Dari segi hukum, kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan hukum dalam sektor pertambangan, yang memberi kesempatan bagi terjadinya praktik korupsi secara sistematis dan berulang.

V.2 Saran

1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Pemerintah dan PT Timah Tbk harus memperkuat mekanisme pemantauan yang ada baik secara internal maupun eksternal, serta melaksanakan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan Regulasi dan Pengawasan

Para penegak hukum perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, termasuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga yang berfokus pada pencegahan korupsi.

3. Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Program pemberdayaan bagi masyarakat setempat perlu ditingkatkan agar mereka tidak bergantung pada kegiatan penambangan ilegal. Pemerintah daerah dan PT Timah Tbk harus mendukung diversifikasi ekonomi, pelatihan keterampilan, serta peningkatan infrastruktur sosial.

4. Memperkuat Regulasi dan Transparansi di Sektor Industri

Pemerintah harus mengkaji ulang serta memperketat regulasi di industri pertambangan, termasuk memperjelas proses perizinan, pengawasan, dan hukuman bagi pelanggaran. Pengeluaran informasi publik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan industri timah di Indonesia dapat menjadi lebih jujur, terbuka, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.